

## INOVASI KREATIF DESA MANDIRI MELALUI BUMDESA SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI DESA: PENDEKATAN SISTEM INFORMASI (BUMDESA PANGEDANGAN)

Eva Herianti<sup>1</sup>, Dahlia Tri Anggraini<sup>2</sup>, Slamet Wahyudi<sup>3</sup>, Endang Rudiati<sup>4</sup>, Dian Mentari Alam<sup>5</sup>, Suprianto<sup>6</sup>, Vivi Silviana<sup>7</sup>, Irfan Rahmatullah<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,6</sup> Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta

<sup>4</sup>Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 1, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

<sup>5</sup>Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi

Jl. Pengantin Ali I No. 71A, Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13740

<sup>7,8</sup>Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Cempaka Putih Tengah XXVII, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10510

\*E-mail: [eva.herianti@umj.ac.id](mailto:eva.herianti@umj.ac.id)

### ABSTRAK

Tantangan terbesar dalam pengelolaan BUMDes yaitu menjadikan BUMDes sebagai tulang punggung pembangunan desa. Badan Usaha Milik desa harus dikelola dengan optimal, bertanggung jawab atas desa. Meningkatkan inovasi desa kreatif yang dilaksanakan di dalam BUMDes, sehingga manfaat yang ingin dicapai dengan mengikuti webinar dapat bermanfaat dalam meningkatkan inovasi kreatif desa yang dilakukan melalui BUMDes untuk menyokong pembangunan desa secara berkelanjutan. Pengabdian kepada masyarakat dihadiri pihak terkait yaitu para kepala desa khususnya, direktur BUMDes serta aparat desa. Sebanyak 118 orang mengikuti webinar ini sebagai peserta kegiatan webinar. Untuk itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta (FEB-UMJ) Berkolaborasi dengan (1) Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2) Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi Jakarta. (3) Ikatan Akuntan Indonesia Forum dosen Akuntansi wilayah Jakarta, (4) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. (5) KAP Slamet Wahyudi. Dalam mensupport aktivitas masyarakat desa melalui BUMDes secara berkelanjutan melalui webinar dan penyuluhan secara berkelanjutan khususnya pada BUMDes.

Kata Kunci: BUMDes, Inovasi Kreatif, Desa Mandiri

### ABSTRACT

*The biggest challenge in managing BUMDes is making BUMDes the backbone of village development. Village-owned enterprises must be managed optimally, taking responsibility for the village. Increasing creative village innovation carried out within BUMDes, so that the benefits to be achieved by participating in the webinar can be useful in increasing creative village innovation carried out through BUMDes to support sustainable village development. The community service was attended by related parties, namely village heads in particular, BUMDes directors and village officials. A total of 118 people took part in this webinar as participants in webinar activities. For this reason, the Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Jakarta (FEB-UMJ) is collaborating with (1) the Director General of Economic Development and Investment in Villages, Disadvantaged Regions and Transmigration. (2) Center for Training and Empowerment of Village Communities, Disadvantaged Areas and Jakarta Transmigration. (3) Indonesian Accountants Association, Jakarta area Accounting Lecturers Forum, (4) Bhayangkara University, Greater Jakarta. (5) KAP Slamet Wahyudi. In supporting village community activities through BUMDes on an ongoing basis through webinars and ongoing counseling, especially at BUMDes.*

*Keywords: BUMDes, Creative Innovation, Independent Village*

## 1. PENDAHULUAN

ALLAH SWT tidak akan merubah suatu kaum jika kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka, itulah ayat yang dikutip (Ar- ra'd ayat 11), untuk mengingatkan kita betapa pentingnya perubahan, Perubahan yang dilakukan dengan cara meningkatkan potensi dan inovasi yang dimiliki pentingnya ber inovasi kreatif dalam perubahan untuk desa melalui bumdesa melalui pendekatan sistem informasi berbasis web, yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa. Desa merupakan pusat pembangunan di Indonesia. Akibatnya, pemerintah terus berupaya meningkatkan ekonomi desa melalui penyediaan Dana Desa dan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sesuai dengan Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4/2015, BUMDes bertujuan untuk meningkatkan ekonomi desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa (<https://indonesiabaik.id>). Selain itu, membuat rencana kerja sama usaha antar desa dan pihak ketiga, membangun jaringan pasar dan peluang untuk memenuhi kebutuhan warga akan layanan umum, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (Danasari, et al. 2023).

Kelangsungan hidup BUMDESA pasca covid19 tidak menjamin akan berkembang dengan cepat kalau tidak didorong dengan kekuatan yang dimiliki oleh potensi desa dan dukungan berbagai pihak terutama pemerintah, pemerintah harus tanggap, lincah, dan kolaboratif untuk mengembalikan sektor-sektor yang berdampak pandemi termasuk aktivitas BUMDESA yang merupakan tulang punggung perekonomian desa. Dengan mempertahankan nilai-nilai lokal, desapun mampu mengikuti perkembangan zaman dengan adanya teknologi digital dalam berbagai informasi, sebagaimana yang dikatakan bahwa masa depan dibuat oleh apa yang akan kita lakukan (Masterplandes.com).

Dengan adanya sistem informasi berbasis web terhadap pengenalan BUMDESA merupakan bentuk inovasi BUMDESA dalam melakukan aktivitas dan pengenalan produk-produk unggulan BUMDESA yang dimiliki, dengan cara memanfaatkan potensi desa yang ada. Salah satu program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan salah satu bentuk implementasi pengelolaan keuangan desa yang akan mengelola potensi kemandirian desa dengan berbagai macam kegiatan ekonomi secara swadaya masyarakat dan gotong royong. BUMDes ini termasuk salah satu jenis usaha yang memenuhi kriteria dari SAK EMKM sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuan berdirinya BUMDes yaitu untuk menyejahterakan masyarakat desa bukan mencari keuntungan bagi sebagian orang semata.

BUMDes sebagai instansi publik harus dapat menjalankan amanah yang diberikan oleh otoritas yang lebih tinggi. Salah satu cara untuk menjalankan amanah tersebut adalah dengan menjadi badan usaha yang terpercaya dengan melaksanakan tata kelola yang baik. Segala bentuk kegiatan terutama dalam pengelolaan dana harus memiliki pertanggung jawaban dan kejelasan sebagai wujud tanggung jawab badan usaha. Kecurangan akibat penyalahgunaan aset dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap akurasi laporan keuangan yang disampaikan oleh badan usaha sebagai bentuk akuntabilitas. Organisasi pelayanan masyarakat tidak akan maksimal jika tidak didukung dengan tata kelola yang baik. Masih lemahnya pelaksanaan pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap penggunaan dana desa dalam rangka pengelolaan BUMDes, memberikan tantangan untuk memberikan pemahaman kepada para pengurusnya tentang fungsi, peran, dan tanggung jawab BUMDes. Peran Bumdesa belum dapat berjalan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa maupun memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa, bahwan tidak sedikit pendirian BUMDesa membebani

anggaran belanja desa. BUMdesa yang seharusnya menjadi roda perekonomian desa tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, beroperasi namun tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa.

Tantangan terbesar dalam pengelolaan BUMDes yaitu menjadikan BUMDes sebagai tulang punggung pembangunan desa khususnya dalam hal pemberian sokongan dana. Maka dana yang dikucurkan dari daerah kepada desa (BUMDes) harus dapat dikelola dengan optimal dan juga dipertanggungjawabkan secara jujur kepada pemberi dana. Dengan adanya kesadaran para pengurus BUMDes tentang tanggung jawab atas dana desa, diharapkan para pengurus semakin berhati-hati dan juga kompeten dalam mengelola dana desa demi kemajuan desa masing-masing. Untuk itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta (FEB-UMJ) Berkolaborasi dengan (1) Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2) Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi Jakarta. (3) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. (4) KAP Slamet Wahyudi bermaksud melaksanakan pengabdian masyarakat dalam tridarma perguruan tinggi, berbentuk kegiatan webinar dengan tema "Akuntabilitas dan Inovasi desa Kreatif melalui Bumdesa" dengan peserta Kepala Desa, Direktur BUMDesa dan aparat Desa dalam rangka membantu pemberdayaan masyarakat yang kreatif melalui Pemahaman bentuk akuntabilitas (pertanggungjawaban) keuangan dan mengasah inovasi serta kreativitas produknya.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Dari beberapa desa dikecamatan pagedangan hanya 2 kelurahan yang memiliki BUMdesa dari 11 desa dan kelurahan, dari potensi yang dikembangkan untuk menjadi tujuan wisata dan UMKM, pemerintah dan masyarakat masih mencari jenis usaha yang cocok untuk dikembangkan dimana potensi desa yang bersebelahan dengan MALL AEON dimana AEON merupakan pusat perdagangan terbesar di

Propinsi Banten termasuk Jakarta. Metode yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan metode webinar dan penyuluhan kelapangan sebagai penanganan observasi kepada BUMdesa setempat, dimana pihak mitra yang dituju adalah BUMdesa pagedangan dan Bumdesa Pagedangan. Sejalan dengan metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat sebelumnya tahun 2021-2022, ada beberapa tahapan yang kami lakukan sebelum memulai kegiatan: Meminta Perijinan kegiatan dan kerjasama abdimas dengan LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta, serta (1) Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2) Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi Jakarta. (3) Ikatan Akuntan Indonesia Forum dosen Akuntansi wilayah Jakarta, (4) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. (5) KAP Slamet Wahyudi. Dalam mensupport aktivitas masyarakat desa melalui BUMdesa secara berkelanjutan melalui webinar dan penyuluhan secara berkelanjutan khususnya pada BUMDesa yang dikhususkan untuk BUMdesa Kecamatan Pagedangan.

Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut :

Tahap Persiapan

(1) Tim abdimas yang sudah diberikan tugas mempersiapkan kelengkapan administrasi, surat menyurat, surat izin dan bahan. Materi.

(2) Persiapan media ataupun alat dan fasilitasi penunjang yang sudah disiapkan pihak universitas.

(3) Persiapan undangan peserta dan materi

(4) Persiapan panitia pengabdian masyarakat

(5) Tahap Pelaksanaan webinar Langkah berikutnya. Peserta pelatihan diberikan

waktu untuk berdiskusi dan memaparkan permasalahan yang berkaitan dengan materi yang di terima dan masalah yang dihadapi. Tim pengabdian kepada masyarakat terdiri dari beberapa personil yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing terkait dengan lancarnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tugas masing-masing terkait dengan kepakaran masing-masing terdiri dari berbagai bidang yaitu bidang perpajakan, keuangan, marketing, yang dikarenakan mitra merupakan BUMdesa yang seluruh kegiatan lebih kepada kegiatan Business dengan pendekatan sistem informasi.

Mengacu pada kegiatan abdimas Ridwansyah Dkk.,(2021) mengenai tahapan kegiatan pelaksanaan lapangan kegiatan lanjutan yaitu:

1. Survey Lokasi pengabdian kepada masyarakat yang menjadi mitra yaitu kecamatan pagedangan dengan mitra Bumdesa Pagedangan. Menanyakan potensi desa yang dimiliki mitra.



Gambar 1-Survey ke BUMDes Pagedangan



Gambar 2-Wawancara dengan Kepala Desa

Observasi di lapangan mengenai BUMDes dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha, masih jauh dari harapan. Hal ini dilihat dari

pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai BUMDes masing sangat kurang. Ini terjadi karena kepala desa selama ini hanya mengenal tugas sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah di atasnya yang lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi dan penanggungjawab proyek dan program yang datang dari atas. Akibatnya, butuh usaha keras untuk memahami BUMDes yang lebih bertumpu pada masalah kewirausahaan. Lemahnya pemahaman mengenai BUMDes itulah yang membuat wacana BUMDes tidak tersosialisasi dengan baik kepada warga desa sehingga konsep pembangunan desa yang selama ini dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan struktur dari atas. Selain itu pembangunan fisik lebih gampang terlihat sebagai 'prestasi' karena ada bentuk fisik yang terlihat. Berbeda dengan proyek pemberdayaan yang lebih bersifat program yang hasilnya tidak terlihat secara fisik.

Lemahnya pembangunan SDM inilah yang membuat kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan desa tidak berkembang. Penguasaan kemampuan manajerial yang kurang memadai pun menjadi kendala karena tidak mudah bagi desa mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal pengelolaan usaha. Kalaupun ada warga yang memiliki kemampuan seperti itu biasanya sudah bekerja di tempat lain dan kalau dia ditunjuk mengelola BUMDes maka itu hanya sebatas sambilan saja. Akibatnya, BUMDes tidak melaju dan jalan di tempat. Sementara jika menunjuk orang dengan kapasitas yang tidak memadai, ditandai dengan track record yang dimilikinya, maka sama saja dengan membawa BUMDes pada arah yang lebih mengawatirkan.

Solusi yang ditawarkan dalam webinar dan penyuluhan yang dilakukan tim pengabdian kepada masyarakat fakultas

ekonomi dan bisnis universitas Muhammadiyah Jakarta adalah memberikan pengetahuan mengenai pentingnya BUMDesa dalam mengatasi permasalahan perekonomian desa, Police Paper Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) yang ditulis oleh Yunanto dkk (2014:3-4) menjelaskan ada sejumlah kelemahan yang secara inheren ada pada BUMDesa, yaitu:

(1) Penataan kelembagaan desa belum berjalan secara maksimal sehingga BUMDesa pun belum dilembagakan dalam format pemerintahan dan perekonomian desa. (2) Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di desa untuk mengelola dan mengembangkan BUMDes yang akuntabel dan berkinerja baik. (3) Rendahnya inisiatif lokal untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga desa. (4) Belum berkembangnya proses konsolidasi dan kerjasama antar pihak terkait untuk mewujudkan BUMDes sebagai patron ekonomi yang berperan memajukan ekonomi kerakyatan. (5) Kurangnya responsivitas Pemda untuk menjadikan BUMDes sebagai program unggulan untuk memberdayakan desa dan kesejahteraan masyarakat. Secara substansial, UU No 6 tahun 2014 mendorong desa sebagai subjek pembangunan desa.

## 2. Pelaksanaan Kegiatan Webinar

Rencana kegiatan webinar mengundang aparat desa (BUMDes)

## 3. Evaluasi kegiatan webinar

Evaluasi kegiatan webinar ini dengan menanyakan kesan dan pesan acara webinar. Dan juga menanyakan kepada peserta webinar tentang usulan materi webinar selanjutnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai hasil observasi di lapangan bahwa pengurus BUMDes membutuhkan sosialisasi tentang pengelolaan organisasi BUMDes. Maka tim PkM UMJ mengadakan kegiatan webinar yang dilaksanakan selama 1 hari yaitu pada tanggal 25 Februari 2023

pukul 09.00-12.00 dengan tema “Akuntabilitas dan Inovasi desa Kreatif melalui BUMDes”.



Gambar 3. Pamflet Kegiatan Webinar

Peserta webinar ini adalah Kepala Desa, Direktur BUMDes aparat Desa, serta pengurus BUMDes sebanyak 110 orang yang berasal dari BUMDes yang tersebar di provinsi Indonesia yaitu dari Kabupaten Kerinci, Banjar, Riau, Kuningan, Bengkalis, Kalimantan Tengah, Probolinggo, dan provinsi lainnya.



Gambar 4. Pemateri 1 dan 2

Materi pertama yaitu tentang akuntabilitas BUMDes dibawakan oleh Ibu Herlina yang merupakan Perwakilan dari Dirjen Kemendes PDPT. Pembahasan mengenai UU Nomor 4 Tahun 2017 tentang penerapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017, sebagaimana tertulis

pada pasal 4 ayat (3) program dan kegiatan terutama BUMDes atau BUMDes Bersama, embung, produk unggulan desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga desa. Harapan yang selalu disampaikan oleh Kemdes PDTT adalah lahirnya lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa dan dapat menekan angka kemiskinan secara nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka BUMDes harus memiliki akuntabilitas serta inovasi dan kreativitas yang tinggi. Untuk itu kementerian Desa dan Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyediakan fasilitas berupa pelatihan bagi masyarakat desa yaitu BUMDes dan juga pemberdayaan. Program ini juga bekerja sama dengan perusahaan bisnis seperti Astra yaitu Desa Astra Sejahtera, Desa BRILLIAN, Desa Ekspor, dan sebagainya.



Gambar 5. Pelaksanaan Webinar



Gambar 6. Materi 1 Webinar

Selain itu, pada materi ke 2 menjelaskan bahwa Kementerian Desa melalui Balai Besar juga menyelenggarakan pelatihan untuk

meningkatkan kemampuan manajerial dan teknik pengelolaan BUMDes. Terdapat inovasi dalam bidang sistem informasi BUMDes yaitu SalamDesa, Simpemas, Data GIS, Uji Coba Praktik di Demplot, dan Pelatihan Mandiri. Semua ini merupakan bagian dari kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat desa.

Karena BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (UU No. 6/2014 tentang Desa Pasal 1, Ayat (6)). Adapun tujuan mendirikan BUMDes adalah (1) Meningkatkan perekonomian Desa, (2) Mengoptimalkan aset Desa, (3) Meningkatkan usaha masyarakat, (4) Mengembangkan rencana kerja, (5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar, (6) Membuka lapangan kerja, (7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (8) Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, (9) dan Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (PAD). Peserta webinar sangat antusias dalam menyimak acara ini. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta kepada pemateri webinar.

Evaluasi dari kegiatan ini yaitu para peserta webinar dan juga kordinator UMKM di bawah BUMDes Pagedangan mengisi kuesioner secara langsung dan online. Para peserta webinar berharap bahwa kegiatan PkM dilaksanakan lagi di waktu yang akan datang.

#### 4. KESIMPULAN

Materi webinar dan penyuluhan ini mengenai pembenahan Bumdesa menjadi penggerak perekonomian dan menjadikan Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Jakarta (FEB-UMJ) berkolaborasi dengan (1) Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2) Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat desa, Daerah desa kreatif dan inovatif dengan pendekatan Sistem informasi melalui Web. Acara sosialisasi yang dihadiri oleh 110 peserta yang merupakan pengurus BUMDes dari berbagai daerah berjalan lancar. Dengan merumuskan beberpa kesimpulan:

- a. Keadaan desa masih minim kesejahteraannya (kemiskinan di desa pada angka 12,29%, angka stunting masih tinggi 24,4%, angka pengangguran di desa 3,72%, serta terdapat desa tertinggal sebanyak 9.548 dan desa sangat tertinggal 4.982).
- b. Pemerintah membuat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab, dan juga untuk mendorong munculnya prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat, guna mengembangkan potensi dan aset desa.
- c. Perencanaan pembangunan Desa yang partisipatif berbasis data serta kelembagaan Desa yang semakin dinamis dan budaya adaptif menjadi dasar dan fondasi penting dalam penguatan Desa.
- d. Pemerintah menggelontorkan Dana Desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan terbukti tingkat pengangguran desa semakin menurun.
- e. Salah satu alokasi dana desa yaitu untuk pendirian BUMDes.
- f. BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- g. Prioritas penggunaan dana desa pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan,

dan perikanan, juga jasa meliputi usaha industri kecil, dan lain sebagainya.

h. Pemerintah menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk pemberdayaan desa, diantaranya Desa Sejahtera Astra, Desa BRILian, Desa Ekpor, dan lain sebagainya.

i. Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Kementerian yaitu Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BBPPMD) Jakarta, Berada Dibawah Dan Bertanggung Jawab Kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (Permendesa 22 Tahun 2020)

j. Tugas BBPPMD bertugas untuk Melaksanakan Pelatihan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.

k. Fungsi BBPPMD di antaranya pelaksanaan fasilitasi dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat, serta penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

l. Salah satu jenis pelatihannya yaitu untuk peningkatan kemampuan manajerial dan teknik pengelola BUMDes

m. Inovasi dalam bidang sistem informasi yaitu SalamDesa, Simpelmas, Data GIS, Uji Coba Praktik di Demplot, dan Pelatihan Mandiri.

Implikasi praktisnya bahwa BUMDes merupakan bentukan dari amanat Undang-Undang yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Merupakan tanggungjawab pemerintah untuk menjaga eksistensi BUMDes melalui pelatihan dan pengembangan SDM yang dilakukan Kementerian dan Balai Besar Desa.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM-UMJ) yang telah mendanai seluruh kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini. Dalam skema Hibah PkM internal dengan Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat Internal Tahun Pelaksanaan 2023 Antara Universitas Muhammadiyah Jakarta Dengan Pengabdian Nomor: 240/R-UMJ/VII/2022 tertanggal 24 Juli 2023. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra PkM kami yaitu BUMDes Pagedangan yang telah berkolaborasi dalam kegiatan PkM ini. Semoga kegiatan ini membawa banyak manfaat untuk kami, LPPM UMJ, dan BUMDes Pagedangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, IN. Mahmud, A. Susilowati, N. & Prawitasari, AB. 2021. Sinergitas BUMDes dalam Manajemen Pengelolaan Desa Wisata Menuju Pariwisata Berkelanjutan. ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 25 Nomor 2. Universitas Negeri Semarang
- Aminah, S. Karateng, M. Afmi, N. Randa, S. Astriana. Alfian, D. Yunus, C. Junedi. Juniarti. Yunita, R. Warahma, W. Hasriani. Ume, I. Damayanti, R. Putri, ARR. & Pratiwi, D. 2022. Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Kegiatan Pendampingan Pengelolaan BUMDes di Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang. JURDIKMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Sosiosaintifik Volume 4 Nomor 1
- Azhari. 2019. Model Pemberdayaan BUMDes dan Solusi Pembangunan Ekonomi Desa: Suatu Kajian Literatur. Jurnal J-Iskan Volume 1 Nomor 2
- Danasari, I.F DKK (2023) Sosialisasi peran dan fungsi BUMDESA dalam Upaya peningkatan perekonomian Masyarakat melalui potensi desa wisata tetabatu, Jurnal abdimas (Journal of community service) :SASAMBO hal 297-303
- Edy Yusuf, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono, and Darwanto Darwanto. 2016. "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)." Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis 13(1)
- Harahap, MA. Alam, AP. Saleh, M. Arianti, C. Jahadi, D. & Wirdany. 2020. Sosialisasi Pengelolaan Potensi Desa Melalui BUMDes. Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat Volume 3 Nomor 1
- Hasniati. 2016. Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik (JAKPP) Volume 2, Nomor 1
- <https://indonesiabaik.id/infografis/bumdes-untuk-pembangunan-des>
- Lejap, HHT. Ese, TH. Hasan, IM. Lengari, ARR. Suban, YF. Tokan, PL. Jelatu, GR. Making, MRK. Hayon, EAP. Yosua, IKD. & Riwu, AAS. 2022. Kajian & Pemaparan Potensi BUMDes di Desa Lamatuka-Nusa Tenggara Timur. RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 3 Nomor 2
- Mujazie, Surfini. 2021. Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Fenomena Pada Bumdes Tanjung Raya Desa Boyan Tanjung, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Proceeding Seminar Bisnis Seri V
- Mulyadi, R. Januarsari, Y. Indriana, I. & Nurhayari, E. 2023. Pendampingan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Rangka

- Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kubang Puji Kecamatan Pontang. Community Development Journal Volume 4 Nomor 1
- Ridwansyah, M. Hastuti, D. Heriberta. Syaparuddin. & Emilia. 2021. Penguatan BUMDes dengan Memaksimalkan Pemanfaatan Berbagai Fasilitas Digital. STUDIUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 1 Nomor 2
- Riwayat, F. 2021. Pengelolaan Potensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mataiwoi Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Rosmayani & Mardatillah, A. 2022. Pendampingan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. CANANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 2 Nomor 1
- Sari, WIR. Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan BUMDes di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara Pada Masa Pandemi COVID-19. Book Capter
- Sumiyati & Yusnita, Maya. 2022. Program Pendampingan Badan Usaha Milik Desa Menuju Ekonomi Mandiri di Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. LITERASI: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Volume 2 Nomor 2
- Vibri yanti,D.(2020) Kesehatan Mental Masyarakat mengelola kecemasan ditengah pandemic covid-19, Jurnal Kependudukan Indonesia Hl 69-74.
- Wahdaniel.A.N, DKK(2023), Strategy pengembangan BUMDESA yang berdaya saing di era digitalisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi, MADANI: Indonesia journal of civil society vol.5,No.2. hal 121-130.
- Yani, A. DKK (2019) Peran dan fungsi badan usaha milik desa dalam meningkatkan kegiatan ekonomi Masyarakat pedesaan. (didesa karuminting kecamatan Sungai raya kabupaten bengkayang)Prosiding SATIESP, HAL 165-170
- Zaenuri, M. Atmojo, ME. & Iqbal, M. 2019. Penataan Kelembagaan BUMDES Berbasis Pariwisata. ALTRUIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Universitas Sanatha Dharma, Yogyakarta [http://e-journal.usd.ac.id/index.php/ABDI\\_MAS](http://e-journal.usd.ac.id/index.php/ABDI_MAS).